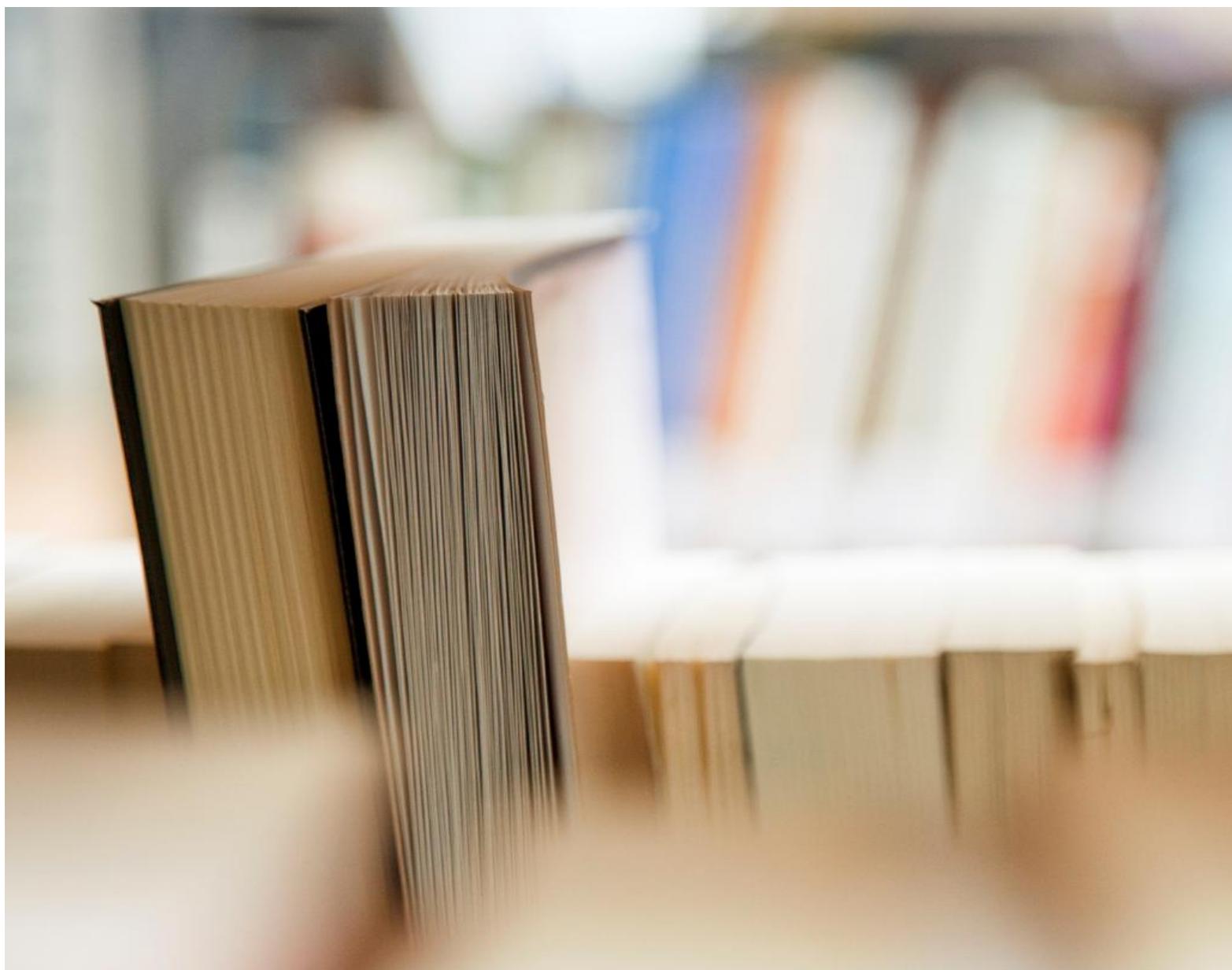




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



RENCANA AKSI 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta

Jl. Veteran No.139 Purwakarta



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Sampurasun,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas, fungsi serta program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Aksi ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Purwakarta, 06 Pebruari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Hariman Budi Anggoro, ST.MT
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19790605 200501 1 013



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Landasan Hukum.....	8
BAB II. RENCANA AKSI	
2.1 Ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	10
2.2 Rencana Aksi Tahun 2025.....	10
BAB III. PENUTUP.....	26



BAB I

PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah dokumen rencana yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat, sehingga kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan



data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan rewiu hasil evaluasi renja tahun lalu. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Aksi, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada Renja;
- b. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dalam dokumen perencanaan.
- c. Aksi kegiatan yang direncanakan memuat waktu pelaksanaan. Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen Renja dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPD, Renstra dan Renja.

2) TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi



Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

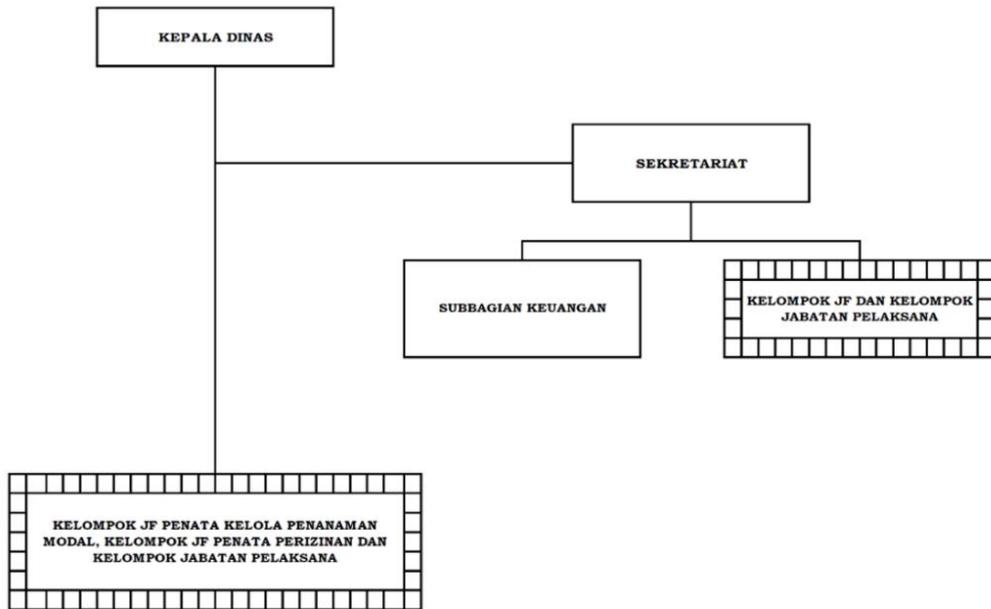
b. Fungsi

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



c. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA



Sumber : DPMTSP 2022

d. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai DPMTSP sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 83 orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	%
1.	Pegawai Negeri Sipil		
	- Jabatan Struktural	3	3,61
	- Jabatan Fungsional	16	19,28



	- Jabatan Fungsional Pelaksana	24	28,92
2.	Non Pegawai Negeri Sipil		
	- Pegawai Tidak Tetap	5	6,03
	- Tenaga Harian Lepas	35	42,16
JUMLAH		83	100%

Sumber : DPMPTSP 2023

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Pasca Sarjana	9	10,85
2.	Sarjana	34	40,97
3.	Diploma IV	2	2,40
4.	Diploma III	2	2,40
5.	SMA	35	42,17
6.	SMP	-	-
7.	SD	1	1,21
JUMLAH		83	100%

Sumber : DPMPTSP 2023

Tabel 1.3

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan tahun 2024

NO	GOLONGAN	a	b	c	d	e	JML	%
1.	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
2.	Golongan II	-	1	-	11	-	12	27,91



3.	Golongan III	6	4	1	13	-	24	55,82
4.	Golongan IV	7		-	-	-	7	16,27
JUMLAH							43	100%

Sumber : DPMPTSP 2024

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2024

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1.	Laki-laki	45	54,22
2.	Perempuan	38	45,78
JUMLAH		83	100%

Sumber : DPMPTSP 2024

3). MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Maksud dari Rencana Aksi Tahun 2025 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta per triwulan.
- b) Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana aksi ini juga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

4). LANDASAN HUKUM

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan ;



BAB II

RENCANA AKSI

1) IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja terhadap target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berdasarkan tujuan/sasaran strategis jangka menengah. Maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Sasaran Pertama,

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal.

Indikator : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 8,15 Triliun.

Sasaran Kedua,

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar Sangat Baik.
2. Nilai SAKIP dengan target kinerja pada tahun 2024 adalah AA



Dari indikator kinerja utama tersebut diperjanjikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta sebagai pemberi mandat dalam bentuk Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja DPMPPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	8,15 T
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
		Nilai SAKIP	AA

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada rencana kinerja tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, maka terdapat 6 (enam) Program yang mendukung sasaran strategis dan sasaran operasional.



Tabel 2.2
Program dan Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 109.999.900	APBD
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 152.500.000	APBD
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 215.000.000	APBD
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 350.000.000	APBD
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 175.900.000	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.352.098.144	APBD

2) RENCANA AKSI TAHUN 2025

Rencana Aksi Tahun 2025 merupakan aktualisasi dari program dan kegiatan sehingga akan selaras dengan Rencana Kerja Tahun 2024, dengan demikian pencapaian rencana aksi akan ikut menyokong pencapaian pembangunan daerah. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada periode Tahun 2025 ini adalah upaya dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, rencana aksi tahun 2025 terangkum dalam :



1. Anvesta

Merupakan Bentuk Apresiasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terhadap pelaku usaha dalam hal realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, kepatuhan perizinan, kepatuhan penyampaian LKPM, keberlanjutan usaha, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari Keberadaan Perusahaan.

2. UMK Naik Kelas / Kemitraan

Fasilitasi kemitraan antara UMK dengan Perusahaan Besar. Kemitraan ini bertujuan agar UMK di Kabupaten Purwakarta dapat menembus rantai produksi global, dan meningkatkan usaha UMK menjadi lebih kompetitif, sehingga UMK dapat “naik kelas”.

3. Purwakarta *Investment Project Ready To Offer (IPRO)*

Penggalian Potensi dan Penyusunan dokumen peluang proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor, *market sounding* serta pemantauan/pengawasan rencana proyek investasi

4. Pembentukan Tim Peningkatan Investasi Daerah

Pembentukan Tim kolaboratif dan pentahelix yang berkaitan dengan investasi, Berfokus pada strategi promosi dalam meningkatkan realisasi investasi dari berbagai sektor.



5. Website Investasi

Pengembangan *website* investasi, dituangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang mengkolaborasikan promosi investasi, perdagangan, jasa dan pariwisata dengan promosi inovasi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Purwakarta (<https://investasi.purwakartakab.go.id/>).

6. KOSMIK

Kompetisi sinematografi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purwakarta (makanan, minuman, kriya, pakaian, pariwisata dsb).

7. MPP Madukara, Teras Madukara dan Pojok Madukara.

Tempat pendampingan pelayanan publik yang dapat melayani masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, administrasi kependudukan, sidang online Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, pelayanan Taspen dan pelayanan keimigrasian.

8. Pepeling NIB (Pelayanan Perizinan Keliling)

Kegiatan ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) baik perorangan maupun badan usaha. Seiring dengan arahan dari Presiden melalui Kementerian Investasi / BKPM RI, maka potensi dari pelaku usaha mikro kecil ini menjadi



penopang perekonomian nasional dan juga regional. Di Jawa Barat sendiri, diperkirakan terdapat pelaku UMK dimana sebagian besar melakukan usaha tanpa legalisasi (tidak berizin). Beberapa keuntungan dengan adanya NIB ini antara lain tercatat sebagai pelaku usaha yang legal sehingga dapat memberikan gambaran data dan informasi mengenai usaha seperti jumlah tenaga kerja, asset dan laporan keuangan yang kemudian akan memudahkan UMK ini untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih besar. Selain itu, NIB juga merupakan prasyarat untuk mendapatkan sertifikasi halal yang juga akan difasilitasi oleh DPMPTSP berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Diharapkan dengan banyaknya pelaku usaha UMK yang legal akan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Purwakarta.

9. GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan *Online*)

Pemanfaatan OSS RBA dalam pelayanan perizinan belum optimal dikarenakan banyaknya perizinan berusaha maupun non berusaha belum diakomodir dalam aplikasi OSS RBA. Oleh karena itu, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta membuat suatu sistem aplikasi sendiri sebagai inovasi dalam peningkatan pelayanan perizinan.

10. MPP Digital (Mall Pelayanan Publik Digital)



Instruksi Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Walaupun begitu, Aplikasi MPP Digital sebagai Digitalisasi Fungsi Mal Pelayanan Publik dalam rangka percepatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. MPP Digital Provinsi Jawa Barat juga bukan menjadi suatu substitusi tetapi merupakan komplementer dari MPP Fisik yang telah ada.

11. Forum Penyelesaian Masalah

Merupakan forum yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian permasalahan penanaman modal bagi investor yang mempunyai permasalahan.

12. Pengawasan dan BESTIE LKPM (Bimbing, Edukasi, Supervisi, Trust, Identifikasi dan Eksekusi LKPM).

Pelayanan menyeluruh terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Menyediakan juga layanan “jemput bola” pengisian LKPM pada periode pelaporan maksimal untuk 10 perusahaan di suatu tempat secara bersamaan.

13. Penguatan RB-ZI

Penguatan Kelembagaan melalui Reformasi Birokrasi dan



Zona Integritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, serta melayani secara prima menghasilkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagai satu-satunya Dinas di Purwakarta yang meraih predikat tersebut. Tahun 2024 merupakan langkah awal menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Secara rinci target rencana aksi Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pertriwulan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.:



**TABEL RENCANA AKSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
								I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	02.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	8,15 T		1.003.399.900				
		02.18.02	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	7.70Trilyun Rp. 6.0Persen 884Investor 29.5Persen		109.999.900				
		2.18.02.2.01	Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		60.000.000				
		2.18.02.2.01.0001	Subkegiatan :Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1. Penyusunan Perda Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Perkada dan Kepda di Bidang Penanaman Modal	30.000.000			√	



		2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4 Dokumen	Rekomendasi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang terkena harmonisasi	30.000.000		√		√
		2.18.02.2.02	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen		49.999.900				
		2.18.02.2.02.0004	Subkegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Penyusunan Peta Potensi Investasi berdasarkan sektor usaha / Purwakarta Investment Project Ready To Offer (IPRO)	49.999.900			√	√
		02.18.03	Program : Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Triliun)	2 Kegiatan 8,15 T		152.500.000				
		2.18.03.2.01	Kegiatan :Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen						
		2.18.03.2.01.0002	Subkegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Investment Forum 2. Kosmik /Videografi Promosi Investasi 3. UMK Naik Kelas/Kemitraan 4. Anvesta	100.000.000			√	√
		2.18.03.2.01.0003	Subkegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Tim Peningkatan Investasi Daerah	52.500.000			√	

		02.18.04	Program : Pelayanan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga kerja Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	19.00 Persen 95.58 Persen 96.91 Poin		215.000.000				
		2.18.04.2.01	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Laporan		215.000.000				
		2.18.04.2.01.0005	Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Fasilitasi Pelaku Usaha	5.000.000		√	√	
		2.18.04.2.01.0006	Subkegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	650 Pelaku Usaha	1. Pelayanan dan pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan perizinan berusaha 2. Pembentukan Tim Percepatan Perizinan Berusaha dalam rangka kemudahan berusaha bagi pelaku usaha	150.000.000	√	√	√	√
		2.18.04.2.01.0007	Subkegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	Pemberian layanan konsultasi, pendampingan, Sosialisasi/Diseminasi informasi penanaman modal dan Pengaduan layanan Publik	30.000.000	√	√	√	√



				Terintegrasi secara Elektronik								
		2.18.04.2.01.0008	Subkegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	220 Kegiatan Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaku usaha di bidang perizinan berusaha berbasis risiko sesuai sektor	30.000.000	√	√	√	√	
		02.18.05	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	20 Persen		350.000.000					
		2.18.05.2.01	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen		350.000.000					
		2.18.05.2.01.0004	Subkegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15 Kegiatan Usaha	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan 2. Forum Penyelesaian Masalah dan Hambatan 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan	100.000.000		√	√		



		2.18.05.2.01.0005	Subkegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (BESTIE LKPM)	200.000.000		√	√	
		2.18.05.2.01.0006	Subkegiatan : Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35 Kegiatan Usaha	1. Inspeksi Lapangan 2. Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 3. Pengawasan terintegrasi	50.000.000	√	√	√	√
		02.18.06	Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100.00 Persen		175.900.000				
		2.18.06.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		175.900.000				



		2.18.06.2.01.0002	Subkegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	1. Pengembangan aplikasi Gaspol dan Pengembangan MPP Digital 2. Penyajian Data 3. Pengolahan data, evaluasi dan pelaporan perizinan penanaman modal (RB ZI, Evaluasi Kinerja PTSP, MPP)	175.900.000	√	√	√	√
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	02.18.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat	A, Sangat Baik		13.352.098.144				
		2.18.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen		52.437.000				
		2.18.01.2.01.0001	Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen (DPA, RKA, DPPA, Perubahan RKA, Renja 2025, Perubahan Renja 2024)	20.010.400	√	√	√	√
		2.18.01.2.01.0006	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen LKIP	10.128.050	√			
		2.18.01.2.01.07	Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen (Laporan Evaluasi	22.298.550	√	√	√	√

						Pelaksanaan Program Kegiatan)				
		2.18.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan		7.956.946.093			
		2.18.01.2.02.0001	Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.936.946.093	√	√	√
		2.18.01.2.02.0005	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	√		
		2.18.01.2.02.0007	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	3 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000		√	√
		2.18.01.2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Dinas Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan		20.000.000			
		2.18.01.2.03.0005	Subkegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	√	√	√
		2.18.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Daerah	Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi	2 Kegiatan		353.612.000			



				Kepegawaian Yang Dilaksanakan							
		2.18.01.2.05.0002	Subkegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	163.212.000		√		
		2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.05.0009	Subkegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	85 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180.400.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan		708.788.000				
		2.18.01.2.06.0001	Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.06.0003	Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.06.0004	Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	270.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.06.0005	Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	152.788.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.06.0006	Subkegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Paket	5 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	5.000.000	√	√	√	√



				Undangan yang Disediakan		Undangan yang Disediakan					
		2.18.01.2.06.0008	Subkegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.06.0009	Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan koordinasi dan konesultasi	170.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.06.1000	Subkegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	25.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan		301.483.851				
		2.18.01.2.07.0005	Subkegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit	10 Paket Mebel yang Disediakan	105.000.000			√	
		2.18.01.2.07.0006	Subkegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 Unit	3 Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk DPMPPTSP, MPP dan Teras	196.483.851			√	
		2.18.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan		3.225.431.200				
		2.18.01.2.08.01	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.08.02	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	731.200.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.08.04	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	40 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.489.231.200	√	√	√	√



				Kantor yang Disediakan							
		2.18.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan		733.400.000				
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Laporan Pemeliharaan / Pembayaran Pajak Kendaraan	46.400.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Laporan Pemeliharaan / Pembayaran Pajak Kendaraan	81.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.09.0005	Subkegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Laporan Mebel yang Dipelihara	25.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.09.0006	Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155 Unit	Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	136.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.09.0009	Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	395.000.000	√	√	√	√
		2.18.01.2.09.0011	Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	√	√	√	√



BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Rencana Aksi disusun dengan mempedomani Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang mengacu kepada RPD 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 (RKPD).

Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Aksi ini secara umum menguraikan rencana kegiatan yang langsung menghasilkan output. Maka dengan mempedomani Rencana Aksi Tahun 2025 ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD, diharapkan tugas fungsi dinas dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi. Yang terpenting bahwa Rencana Aksi ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pegawai



yang disertai pengabdian dan loyalitas yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Demikianlah dokumen Rencana Aksi untuk periode tahun 2025 ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.